

PENGANTAR REGULASI KEPELABUHANAN



Andi Sitti Chairunnisa Mappangara
Arief Nurtjahjo

**Andi Sitti Chairunnisa Mappangara
Arief Nurtjahjo**

PENGANTAR REGULASI KEPELABUHANAN



PENGANTAR REGULASI KEPELABUHANAN

Penulis : **Andi Sitti Chairunnisa Mappangara**

Penyunting : **Marwati, S.Sos.**

Tata sampul : **Rezkiawati, S.Pd.**

Tata isi : **Tammy. HS.**

Cetakan Pertama, **Desember 2023**

ISBN **xxx-xxx-xx-xxxx-x**

Penerbit **Professorline**

🏠 Jl. Dg. Ngadde Raya, Parangtambung, Makassar,
Sulawesi Selatan, Indoneisa

✉ professorline123@gmail.com
adminbook@professorline.com

☎ +62 853-4177-7525

🌐 www.professorline.com

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang.
Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku
baik secara elektronik maupun mekanik tanpa izin tertulis
Penerbit Professorline.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga buku ajar ini dapat diselesaikan dan diterbitkan. Buku ajar ini berjudul "Pengantar Regulasi Kepelabuhanan" dan ditujukan untuk mahasiswa program studi Ilmu Hukum, khususnya yang mengambil mata kuliah Hukum Pelayaran dan Kepelabuhanan.

Buku ajar ini disusun dengan tujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman dasar tentang konsep, prinsip, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kepelabuhanan di Indonesia. Kepelabuhanan merupakan salah satu sektor penting dalam perekonomian nasional, karena berperan sebagai pintu gerbang perdagangan, transportasi, dan logistik. Kepelabuhanan juga memiliki dampak terhadap lingkungan, sosial, dan keamanan. Oleh karena itu, regulasi kepelabuhanan harus disusun dan diterapkan dengan baik, agar dapat menciptakan sistem kepelabuhanan yang efisien, efektif, dan berkelanjutan.

Buku ajar ini terdiri dari tujuh bab, yaitu, Bab I: Pengertian dan ruang lingkup kepelabuhanan, termasuk konsep, fungsi, tujuan, jenis, komponen, pelaku, hak dan kewajiban, dan prinsip-prinsip kepelabuhanan di Indonesia. Bab II: Peraturan perundang-undangan yang mengatur kepelabuhanan, termasuk Undang-undang Pelayaran, Peraturan Pemerintah Kepelabuhanan, Peraturan Pemerintah Penyelenggaraan Bidang Pelayaran, dan Peraturan Menteri Perhubungan terkait kepelabuhanan. Bab III: Penyelenggaraan pelabuhan, termasuk badan usaha pelabuhan, konsesi kepelabuhanan, perencanaan dan pembangunan pelabuhan, dan pengoperasian dan pemeliharaan pelabuhan. Bab IV: Pelayanan dan jasa kepelabuhanan, termasuk jenis, tarif, standar, dan mekanisme pelayanan dan jasa kepelabuhanan, serta hak dan kewajiban pengguna dan penyedia jasa kepelabuhanan. Bab V: Kinerja dan keamanan kepelabuhanan, termasuk indikator, metode, dan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja dan keamanan kepelabuhanan, serta upaya-upaya untuk meningkatkan kinerja dan keamanan kepelabuhanan. Bab VI: Keselamatan dan kelestarian lingkungan kepelabuhanan, termasuk peraturan, standar, dan praktik yang berkaitan dengan keselamatan dan kelestarian lingkungan kepelabuhanan, serta dampak dan resiko yang ditimbulkan oleh kegiatan kepelabuhanan

terhadap keselamatan dan kelestarian lingkungan. Bab VII: Kerjasama dan hubungan internasional kepelabuhanan, termasuk perjanjian, organisasi, dan inisiatif yang berkaitan dengan kerjasama dan hubungan internasional kepelabuhanan, serta peluang dan tantangan yang dihadapi oleh Indonesia dalam kerjasama dan hubungan internasional kepelabuhanan.

Setiap bab dilengkapi dengan soal latihan dan kesimpulan untuk menguji pemahaman dan mengulang materi yang telah dipelajari. Kami berharap buku ajar ini dapat bermanfaat bagi para mahasiswa, dosen, praktisi, dan masyarakat umum yang tertarik dengan topik kepelabuhanan.

Kami menyadari bahwa buku ajar ini masih memiliki banyak kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu, kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca untuk perbaikan buku ajar ini di masa mendatang. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung proses penyusunan dan penerbitan buku ajar ini.

Gowa, Desember 2023

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP KEPELABUHANAN ..	1
1.1 Pendahuluan	1
1.2 Definisi Kepelabuhanan.....	2
1.3 Fungsi dan Tujuan Kepelabuhanan	3
1.3.1 Fungsi Kepelabuhanan.....	3
1.3.2 Tujuan Kepelabuhanan	8
1.4 Jenis-jenis Pelabuhan	11
1.5 Komponen-komponen Pelabuhan	20
1.6 Pelaku-pelaku Kepelabuhanan	26
1.7 Hak dan Kewajiban Pelaku Kepelabuhanan	29
1.8 Prinsip-prinsip Kepelabuhanan.....	38
1.9 Soal Latihan	41
1.10 Kesimpulan.....	43
BAB II PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TENTANG KEPELABUHANAN	47
2.1 Pendahuluan	47
2.2 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.....	48
2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan	53
2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran	57
2.5 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 72 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelabuhan.....	61
2.6 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 121 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Jasa Kepelabuhanan	67
2.7 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 50 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut.....	69
2.8 Soal Latihan	74
2.9 Kesimpulan	75

BAB III PENYELENGGARAAN PELABUHAN	79
3.1 Pendahuluan	79
3.2 Penyelenggaraan Pelabuhan	80
3.3 Badan Usaha Pelabuhan.....	83
3.3.1 Jenis dan Lokasi Pelabuhan yang Dikelola oleh Badan Usaha Pelabuhan.....	83
3.3.2 Jenis Jasa Kepelabuhanan yang Disediakan dan/atau Diberikan oleh Badan Usaha Pelabuhan	84
3.3.3 Persyaratan, Prosedur, dan Mekanisme Perizinan Berusaha Badan Usaha Pelabuhan.....	85
3.3.4 Kewajiban dan Hak Badan Usaha Pelabuhan	86
3.4 Konsesi Kepelabuhanan.....	88
3.5 Perencanaan dan Pembangunan Pelabuhan	91
3.6 Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan.....	95
3.6.1 Pengoperasian Pelabuhan.....	96
3.6.2 Pemeliharaan Pelabuhan	99
3.7 Pengawasan dan Pengendalian Pelabuhan	103
3.7.1 Pengawasan dan Penegakan Hukum di Bidang Keselamatan dan Keamanan Pelayaran.....	105
3.7.2 Koordinasi Kegiatan Pemerintahan di Pelabuhan	112
3.7.3 Pengaturan, Pengendalian, dan Pengawasan Kegiatan Kepelabuhanan pada Pelabuhan yang Diusahakan Secara Komersial...	114
3.8 Evaluasi dan Pelaporan Pelabuhan.....	118
3.9 Soal Latihan	120
3.10 Kesimpulan.....	122
BAB IV PELAYANAN DAN JASA KEPELABUHANAN	127
4.1 Pendahuluan	127
4.2 Jenis-jenis Jasa Kepelabuhanan	128
4.3 Tarif Jasa Kepelabuhanan.....	135
4.3.1 Dasar Hukum Tarif Jasa Kepelabuhanan.....	135
4.3.2 Jenis Tarif Jasa Kepelabuhanan	136
4.3.3 Struktur Tarif Jasa Kepelabuhanan	140
4.3.4 Golongan Tarif Jasa Kepelabuhanan	141

4.3.5 Mekanisme Penetapan Tarif Jasa Kepelabuhanan.....	142
4.4 Standar Pelayanan Minimal Jasa Kepelabuhanan.....	143
4.5 Mekanisme Pemberian dan Pencabutan Izin Jasa Kepelabuhanan..	146
4.5.1 Pemberian Izin Jasa Kepelabuhanan	147
4.5.2 Pencabutan Izin Jasa Kepelabuhanan	148
4.6 Kewenangan dan Tanggung Jawab Penyedia Jasa Kepelabuhanan..	150
4.7 Kerjasama dan Persaingan Usaha Jasa Kepelabuhanan	154
4.8 Perlindungan dan Penyelesaian Sengketa Jasa Kepelabuhanan	159
4.8.1 Perlindungan Konsumen Jasa Kepelabuhanan	160
4.8.2 Penyelesaian Sengketa Jasa Kepelabuhanan	164
4.9 Soal Latihan	166
4.10 Kesimpulan.....	167
BAB V KINERJA DAN KEAMANAN KEPELABUHANAN	172
5.1 Pendahuluan	172
5.2 Indikator Kinerja Pelabuhan.....	173
5.3 Metode Pengukuran Kinerja Pelabuhan	178
5.4 Analisis Kinerja Pelabuhan	180
5.5 Strategi Peningkatan Kinerja Pelabuhan	187
5.6 Inovasi dan Teknologi Kepelabuhanan	191
5.7 Pelabuhan Ramah Lingkungan	198
5.8 Pelabuhan Berbasis Masyarakat	201
5.9 Soal Latihan	205
5.10 Kesimpulan.....	206
BAB VI KESELAMATAN DAN KEAMANAN KEPELABUHANAN ..	210
6.1 Pendahuluan	210
6.2 Konsep dan Prinsip Keselamatan dan Keamanan Kepelabuhanan (ISPS CODE)	212
6.3 Regulasi Internasional tentang Keselamatan dan Keamanan Kepelabuhanan	217
6.3.1 Konvensi Internasional tentang Keselamatan Jiwa di Laut (SOLAS).....	217
6.3.2 Konvensi Internasional tentang Standar Pelatihan, Sertifikasi, dan Penjagaan untuk Pelaut (STCW).....	219

6.3.3 Konvensi Internasional tentang Pencarian dan Penyelamatan Maritim (SAR).....	221
6.3.4 Kode Internasional tentang Perlindungan Fasilitas Pelabuhan (ISPS Code).....	222
6.4 Regulasi Nasional tentang Keselamatan dan Keamanan Kepelabuhanan.....	224
6.5 Sistem Manajemen Keselamatan dan Keamanan Kepelabuhanan.....	230
6.6 Fasilitas dan Sarana Keselamatan dan Keamanan Kepelabuhanan.....	233
6.7 Pencegahan dan Penanggulangan Ancaman dan Gangguan Kepelabuhanan	238
6.8 Audit dan Sertifikasi Keselamatan dan Keamanan Kepelabuhanan	241
6.9 Soal Latihan	245
6.10 Kesimpulan.....	246
BAB VII KERJASAMA DAN HUBUNGAN INTERNASIONAL KEPELABUHANAN.....	251
7.1 Pendahuluan	251
7.2 Dasar dan Tujuan Kerjasama dan Hubungan Internasional Kepelabuhanan	252
7.3 Bentuk dan Mekanisme Kerjasama dan Hubungan Internasional Kepelabuhanan	257
7.4 Lembaga dan Organisasi Internasional Kepelabuhanan.....	260
7.5 Perjanjian dan Konvensi Internasional Kepelabuhanan	263
7.6 Program dan Kegiatan Kerjasama dan Hubungan Internasional Kepelabuhanan	266
7.7 Manfaat dan Tantangan Kerjasama dan Hubungan Internasional Kepelabuhanan	274
7.8 Strategi dan Kebijakan Kerjasama dan Hubungan Internasional Kepelabuhanan	280
7.9 Soal Latihan	286
7.10 Kesimpulan.....	287
DAFTAR PUSTAKA	292

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Alur Pelayanan Barang dan Kapal di Pelabuhan.....	4
Gambar 1. 2 Pelabuhan Tanjung Priok.....	12
Gambar 1. 3 Pelabuhan Batu Ampar.....	13
Gambar 1. 4 Terminal Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak ..	14
Gambar 1. 5 Pelabuhan Bitung	16
Gambar 1. 6 Pelabuhan Rakyat Paotere	17
Gambar 1. 7 Fasilitas Utama Pelabuhan	22

DAFTAR PUSTAKA

- [1] C.Boyke,"Perencanaan Pelabuhan dan Terminal,"ITS Press,Surabaya,2019.
- [2] Sujarwanto," Peningkatan Sistem Manajemen Kepelabuhanan Di Indonseia Management System Improvement Portin Indonesia," Jurnal Penelitian Transportasi Laut, Vol.18, No.1, 2016.
- [3] <https://resource-recycling.com/recycling/2019/04/02/indonesia-delays-strict-paper-requirements/>
- [4] <https://mediaindonesia.com/ekonomi/405514/perintah-presiden-pelabuhan-batu-ampar-mulai-bersih-dari-gudang>
- [5] <https://optgperak.dephub.go.id/Beranda/Terminal>
- [6] <http://maritimnews.com/nasib-hub-internasional-pelabuhan-bitung-mau-dibawa-kemana/>
- [7] <https://www.tribunnews.com/images/regional/view/1634531/pelabuhan-rakyat-paotere-peninggalan-kerajaan-gowa>
- [8] Pemerintah Republik Indonesia, "Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan," 2009. [Online].
- [9] Pemerintah Republik Indonesia, "Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan," 2021. [Online].
- [10] Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran," 2008.
- [11] Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, "Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran," 2021. [Online].
- [12] Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, "PP 31/2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran," 2021. [Online].
- [13] Menteri Perhubungan Republik Indonesia, "Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 72 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelabuhan," 2013. [Online].

- [14] Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, “ Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 121 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 72 Tahun 2017 Tentang Jenis, Struktur, Golongan dan Mekanisme Penetapan Tarif Jasa Kepelabuhanan,” Jakarta, 2018. [Online].
- [15] Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, “Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 50 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut,” 2021. [Online].
- [16] Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, “Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran,” 2021
- [17] Kementerian Perhubungan Republik Indonesia,”Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 48 Tahun 2021 Tentang Konsesi dan Kerja Sama Bentuk Lainnya Antara Penyelenggara Pelabuhan dengan Badan Usaha Pelabuhan di Bidang Kepelabuhanan,”2021
- [18] Kementerian Perhubungan Republik Indonesia,” Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 57 Tahun 2020,” Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut,” 2020.
- [19] Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, “Direktorat Kepelabuhanan,” [Online]. [Accessed: 12-Nov-2023].
- [20] Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, “Sub Direktorat Tataan dan Perencanaan Pengembangan Pelabuhan,” [Online]. Available:.. [Accessed: 12-Nov-2023].
- [21] Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, “Sistem Informasi Pelabuhan,” [Online]. Available:.. [Accessed: 12-Nov-2023].
- [22] Kementerian Perhubungan Republik Indonesia,” Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 84 Tahun 2018 Tentang Jenis, Struktur, dan Golongan Tarif Jasa

- Kepelabuhanan, Serta Mekanisme Penetapan Tarif dan Jasa Kepelabuhanan pada Pelabuhan yang digunakan untuk Melayani Angkutan Penyeberangan ,” 2018.
- [23] Pemerintah Republik Indonesia,”Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jasa Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan,” 2016.
 - [24] Kementerian Perhubungan Republik Indonesia,” Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 72 Tahun 2017 tentang Jenis, Struktur, Golongan dan Mekanisme Penetapan Tarif Jasa Kepelabuhanan,” 2017.
 - [25] Kementerian Perhubungan Republik Indonesia,” Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang Konsesi dan Bentuk Kerjasama Lainnya Antara Pemerintah dengan Badan Usaha Pelabuhan di Bidang Kepelabuhanan ,” 2015
 - [26] Otoritas Jasa Keuangan, “Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan,” 2020.
 - [27] O.B. Pana, I.Fahmi, and A.Damar,”Perancangan Sistem Pengukuran Kinerja Otoritas Pelabuhan Performance Measurement System Design Port Authority,” Warta Penelitian Perhubungan, Vol.29, No.1, 2017.
 - [28] N.Mahmudah, and D.Rusadi,”Analisis Kinerja Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya,” UNIID, 2017.
 - [29] A.Ningrat,” Analisis Evaluasi Indikator Kinerja “Pelabuhan Hijau”,”Fropil, Vol.10,No.2,2022.
 - [30] E.Marpaung, “Strategi Peningkatan Pelayanan Pelabuhan dalam Mendukung Sistem Logistik Nasional,” Warta Penelitian Perhubungan, Vol.26, No.1, 2014.
 - [31] W.Kawirian, I.W.Restu, I.K,W.Negara, and A.Razak, “ Strategi Peningkatan Operasional Kesyahbandaran di Pelabuhan

- Perikanan Nusantara (PPN) Pengembangan, Bali,” Jurnal Pengelolaan Perikanan Tropis, Vol.4, No.2, 2020.
- [32] N.Ahmadi, T.Kusumastanto, E.I.Siahaan, “Strategi Pengembangan Pelabuhan Berwawasan Lingkungan (Greenport) Studi Kasus: Pelabuhan Cigading-Indonesia,” Warta Penelitian Perhubungan, Vol.28, No.1, 2016.
- [33] A.Hamzah, and A.Rahmawati, “ Penerapan Eco-Fishing Port Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu, Provinsi Banten,” Jurnal Akuatika Indonesia, Vol.6, No.2, 2021
- [34] A.P.Rindarto, “Implementasi *International Ship and Port Facility Security* (ISPS) Code dalam mencegah Petty Theft dan Armed Robbery Against Ships di Indonesia Tahun 2009-2013,” Journal of International Relations, Vol.2, No.3, 2016.
- [35] Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, “ Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 11 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Konvensi Internasional untuk Keselamatan Jiwa di Laut Beserta Amandemennya,” 2023.
- [36] Pemerintah Republik Indonesia, “ Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran,” Pemerintah Pusat, 2021.
- [37] H. Breivik. "International Association for the Study of Pain: update on WHO-IASP activities.." Journal of pain and symptom management, 24 2 (2002)
- [38] A. Hebbbar, J. Schröder-Hinrichs, M. Mejia, Heike Deggim and S. Pristrom. "The IMO Regulatory Framework for Arctic Shipping: Risk Perspectives and Goal-Based Pathways." Springer Polar Sciences (2020).
- [39] P. E. V. B. Feygin. "Design of Semi-Flexible and Flexible Dolphins with Concrete Pile Caps." Global Journal of Research In Engineering, 15 (2015).
- [40] B. E. Ornitz and M. Champ. "Legislation and Regulation." (2002)